

Analysis of the Application of Fixed Assets Accounting in the Preparation of the Balance Sheet at the North Sulawesi Provincial Office of Cooperatives and SMES

Frizki Rahmayanti Irooth^{1*}, Inggriani Elim², Natalia Y. T. Gerungai³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Frizki Rahmayanti Irooth frizkirahmayantirooth@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Assets, Owned, Entrepreneurship

Received : 05, December

Revised : 11, January

Accepted: 23, February

©2023 Irooth, Elim, Gerungai :

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The more rapid development of technology at this time the community has also thought rationally that the importance of entrepreneurship. To support each activity, the cooperative service will utilize the assets owned. Fixed assets also have an important role, therefore the accounting treatment in the recognition and measurement of fixed assets must be in accordance with Government Accounting Standards. The cooperative service is engaged in controlling public services and receiving results from every cooperative and micro business in North Sulawesi. Therefore the cooperative service has a variety of fixed assets with a fairly high value. In the government's financial statements, fixed assets also play a role in the government's budget, so the recognition, measurement, valuation and disclosure of fixed asset information is very important in the financial statements of an entity. The purpose of this study is to determine the suitability of Accrual-Based Government Accounting Standards Application in Permendagri No. 64 of 2013 concerning Fixed Assets in the Preparation of Balance Sheets at the North Sulawesi Provincial Office of Cooperatives and SMEs in accordance with Statement of Government Accounting Standards No. 07 Concerning Fixed Assets by conducting research that is descriptive qualitative in nature. The results of the study show that the application of accrual-based government accounting standards in Permendagri no. 64 of 2013 concerning fixed assets in the preparation of the balance sheet is in accordance with the government accounting standard statement 07 regarding fixed assets and the Cooperative Office does not apply depreciation of fixed assets so that when the economic useful life has expired the Cooperative Office will write off goods.

Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap dalam Penyusunan Neraca di Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Frizki Rahmayanti Irooth^{1*}, Inggriani Elim², Natalia Y. T. Gerungai³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Frizki Rahmayanti Irooth frizkirahmayantiirooth@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Aset, Milik, Kewirausahaan

Received : 05, Desember

Revised : 11, Januari

Accepted: 23, Februari

©2023 Irooth, Elim, Gerungai :

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini masyarakat pun juga sudah berpikir rasional bahwa pentingnya berwirausaha. Untuk mendukung setiap kegiatan, dinas koperasi akan memanfaatkan harta yang dimiliki. Aktiva tetap juga mempunyai peran yang cukup penting, maka dari itu perlakuan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran aktiva tetap harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dinas koperasi bergerak dalam melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan menerima hasil dari setiap koperasi dan usaha mikro di Sulawesi Utara. Maka dari itu dinas koperasi memiliki bermacam-macam aktiva tetap dengan nilai yang cukup tinggi. Dalam laporan keuangan pemerintah aktiva tetap juga berperan dalam anggaran pemerintah maka pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan informasi aset tetap sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Perapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Aset Tetap dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam permendagri no. 64 tahun 2013 tentang aset tetap dalam penyusunan neraca sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan 07 tentang aset tetap dan Di Dinas Koperasi tidak memberlakukan penyusutan aktiva tetap sehingga ketika masa manfaat ekonomi telah habis maka Dinas Koperasi akan melakukan penghapusan barang.

PENDAHULUAN

Perekonomian yang berkembang pada saat ini cukup pesat, peran perkoperasian dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar. Sehingga perkembangan dalam pembangunan usaha juga semakin berkembang. Dalam perkembangan ini didukung oleh beberapa faktor pendukungnya seperti kemajuan ilmu pengetahuan, dampak yang akan timbul pada suatu perusahaan, teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan semakin canggih khususnya dalam bidang usaha tersebut.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini masyarakat pun juga sudah berpikir rasional bahwa pentingnya berwirausaha. Untuk mendukung setiap kegiatan, dinas koperasi akan memanfaatkan harta yang dimiliki. Aktiva tetap juga mempunyai peran yang cukup penting, maka dari itu perlakuan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran aktiva tetap harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Pengganti PP 24 Tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015. Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lembaga pemerintahan dengan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara karena tujuan Di Dinas Koperasi yaitu mengetahui kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Aset Tetap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu meninjau lebih jauh mengenai kebijakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini dan membandingkannya

dengan teori yang dipelajari. Penulis pun mengangkat judul sesuai dengan permasalahan yang dialami perusahaan, yaitu Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Hery (2016 : 6) Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Diana dan Setiawati (2017 : 3) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan, juga dikenal sebagai akuntansi sektor publik, merupakan jenis sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam sektor publik. Akuntansi pemerintahan menjamin bahwa posisi dan kinerja keuangan institusi sektor publik ditetapkan sesuai dengan anggaran karena masalah keuangan seringkali menjadi perhatian pemerintah.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan akuntansi pemerintahan menurut Hasanah dan Fauzi (2017 :2) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI.

Pengertian Aset Tetap

Menurut Samryn (2016 : 162) menyatakan bahwa aktiva tetap merupakan kelompok aktiva perusahaan yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan.
3. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aktiva tetap.
4. Biasanya mempunyai biaya perolehan yang relatif besar.

Pengertian Neraca

Menurut Syaiful (2020 : 202) Laporan posisi keuangan (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas baik aset, utang, (liabilitas), dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca menjelaskan sumber-sumber ekonomi suatu entitas (aset) dan juga menjelaskan dari sektor mana sumber ekonomi sekaligus penghasilan tersebut diinvestasikan pada tanggal tertentu (utang dan ekuitas).

Komponen Neraca

Menurut Syaiful (2020 : 202) menyatakan bahwa, komponen neraca dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Aset (*Assets*)
Aset di neraca disajikan dengan dimulai dari aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.
2. Kewajiban (*Liability*)
Kewajiban (liabilitas) diklasifikasikan menurut urutan tanggal jatuh temponya. Pertama, utang jangka pendek disajikan menurut tingkat likuiditasnya. Semakin ke bawah susunan utang jangka pendek semakin lama jatuh temponya. Kedua, utang jangka Panjang disajikan menurut tingkat jatuh temponya.
3. Ekuitas (*Equity*)
Ekuitas diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalannya. Penyajian ekuitas di neraca adalah modal dan saldo laba.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Pada pasal 7 ayat (3) dijelaskan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 dijelaskan mengenai kebijakan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan

keuangan adalah lapiran yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berguna menguraikan informasi kejadian, situasi, dan sekaligus menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat Jl. 17 Agustus Manado Sulut 95113, Bumi Beringin, Wenang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai selesai Tahun 2022.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya dan disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* Di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupa hasil wawancara dengan narasumber dan laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan di Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif berupa suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data,. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan pengumpulan data dan mencatat semua data yang diperoleh melalui hasil wawancara bersama narasumber dan dokumentasi tentang laporan keuangan di Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Peneliti menganalisis data yang telah diperoleh. Data yang dianalisis

yaitu aset tetap dalam penyusunan neraca di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Apakah sudah sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 dengan PSAP No. 07 Tentang Aset Tetap.

3. Peneliti menyajikan data laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kesesuaian berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Aset Tetap.

4. Peneliti melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Tabel 1. Penyajian Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a.	Tanah	2.800.500.000	2.800.500.000
b.	Peralatan dan Mesin	4.972.273.735	4.253.701.790
c.	Gedung dan Bangunan	18.258.907.371	18.061.671.350
d.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	203.107.000	203.107.000
e.	Aset Tetap Lainnya	13.356.900	3.356.900
f.	Akumulasi Penyusutan	0	0

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Berikut ini peneliti menyajikan tabel aset tetap dalam penyusunan neraca di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

PEMBAHASAN

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap akan diakui ketika terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah dengan adanya bukti secara hukum seperti akta dan sertifikat kepemilikan. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah :

- Berwujud.
- Memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat tabel perbandingan kesesuaian pengakuan aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010. Tabel perbandingan kesesuaian ini dibuat untuk mengetahui apakah pengakuan aset

tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini tabelnya :

Tabel 2. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara	Keterangan
Masa manfaat lebih dari 12 bulan	Pada Dinas koperasi akan diakui suatu aset pada saat aset tersebut dibeli atau diperoleh	Sesuai
Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Aset diakui menggunakan biaya perolehan	Sesuai
Berwujud	Suatu aset harus memiliki wujud nyata	Sesuai

Hasil dari pembahasan diatas menjelaskan bahwa pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara suatu aset sudah sesuai dari segi pengakuannya. Pengakuan ini akan dihasilkan pada masa manfaat diwaktu yang akan datang, yang akan berdampak pada penyusutan. Sebab saat suatu aset diakui untuk menambah umur ekonomi disitu akan di cantumkan masa penyusutannya.

Penilaian Aset Tetap

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat tabel perbandingan kesesuaian penilaian aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP 07 No. 71 Tahun 2010. Tabel perbandingan kesesuaian ini dibuat untuk mengetahui apakah penilaian aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini tabelnya :

Tabel 3. Perbandingan Penilaian Aset Tetap Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara	Keterangan
Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Sesuai

Hasil dari pembahasan diatas, maka penilaian pada Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No 71 Tahun 2010.

Penyajian Aset Tetap

Berikut merupakan penyajian aset tetap dalam neraca di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat tabel perbandingan kesesuaian penyajian aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP 07 No. 71 Tahun 2010.

Tabel perbandingan kesesuaian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyajian aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini tabelnya :

Table 4. Perbandingan Kesesuaian UKM Daerah Provinsi Sulawesi

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET TETAP	Rp	Rp
Tanah	2.800.500.000	2.800.500.000
Peralatan dan Mesin	4.972.273.735	4.253.701.790.
Gedung dan Bangunan	18.258.907.371	18.061.671350
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	203.107.000	203.107.000
Aset Tetap Lainnya	13.356.900	13.356.900
Akumulasi Penyusutan	0	0
JUMLAH ASET TETAP	19.166.179.835	18.250.371.869

Tabel 5. Perbandingan Penyajian Aset Tetap Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara	Keterangan
Jenis-jenis aset tetap seperti tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan lain sebagainya dicatat terperinci dalam neraca.	Pencatatan disajikan dalam neraca	Sesuai
Penilaian aset di neraca harus disajikan berdasarkan biaya perolehan dan akumulasi	Penyusutan aset tetap disajikan dalam neraca sebagai pengurang nilai	Sesuai

Pengungkapan Aset Tetap

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan aset tetap adalah :

- a) Dasar penialain yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan.
 - 2) Pelepasan.
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada.
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi :
 - 1) Nilai penyusutan.
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan.
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat tabel perbandingan kesesuaian pengungkapan aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP 07 No. 71 Tahun 2010. Tabel perbandingan kesesuaian ini dibuat untuk mengetahui apakah pengungkapan aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini tabelnya :

Tabel 6. Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara	Keterangan
Laporan keuangan mengungkapkan dasar nilai untuk menentukan nilai tercatat.	Pengungkapan aset tetap yang terjadi di dinas koperasi yaitu, berdasarkan perolehan awal suatu aset tetap yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang pada penilaian aset yang bersangkutan.	Sesuai
Pelepasan	Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.	Sesuai

Hasil pembahasan diatas menjelaskan bahwa laporan keuangan mengungkapkan dasar nilai untuk menentukan nilai tercatat pada Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengukuran Aset Tetap

Pada dasarnya aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap adalah seluruh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi siap bekerja untuk digunakan sesuai tujuannya, seperti harga beli, harga konstruksi, bea impor, dan lain sebagainya. Apabila nilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai dengan wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat tabel perbandingan kesesuaian pengukuran aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP 07 No. 71 Tahun 2010. Tabel perbandingan kesesuaian ini dibuat untuk mengetahui apakah pengukuran aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini tabelnya :

Tabel 7. Perbandingan Pengukuran Aset Tetap Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara	Keterangan
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap serta biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset yang bersangkutan siap digunakan.	Sesuai
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku biaya perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan biaya yang dikenakan dalam pembangunan	Pada Dinas Koperasi biaya perolehan diperoleh dari biaya-biaya angkut dan biaya tenaga kerja	Sesuai

Hasil dari pembahasan diatas menjelaskan bahwa pada Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Pada perbandingan pengukuran dapat dikatakan sesuai dikarenakan biaya perolehan tersebut mencakup dari beberapa biaya seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya perlengkapan dan tenaga listrik.

Akumulasi Penyusutan

Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu, pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Adanya penyusutan untuk memperkirakan sisa masa manfaat dari aset tetap dan juga untuk mencerminkan nilai wajar bagi aset tetap tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat tabel perbandingan kesesuaian penyusutan aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP 07 No. 71 Tahun 2010. Tabel perbandingan kesesuaian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyusutan aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini tabelnya :

Tabel 8. Perbandingan Penyusutan Aset Tetap Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

PSAP 07 PP No. 71 Tahun 2010	Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara	Keterangan
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	Dalam penelitian ini pada dinas tidak melakukan akumulasi penyusutan dan tercatat pada neraca.	Belum sesuai tetapi sudah di catat oleh BPKAD

Hasil dari pembahasan diatas dijelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak ada akumulasi penyusutan. Secara keseluruhan dari tabel terbandingan aset tetap yaitu sudah sesuai dengan penerapam Standar Akuntansi Aset Tetap dari pengakuan, penilaian, penyajian, pengungkapan, dan pengukurannya. Tetapi dari penyusutannya belum sesuai dikarenakan di Dinas Koperasi tidak melakukan pencatatan penyusutan tetapi dicatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam menganalisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran penilaian pengungkapan dan penyajian aset tetap sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara disajikan ke neraca sudah sesuai dengan klasifikasi masing-masing sebesar harga perolehannya. Dalam pengakuan aset dijelaskan bahwa pengakuan ini akan dihasilkan pada masa manfaat diwaktu yang akan datang. Jika dibandingkan dengan dengan pengukuran dapat dikatakan telah sesuai dikarenakan biaya perolehan tersebut dapat mencakup biaya-biaya Dinas Koperasi.

Rekomendasi

1. Kebijakan Dinas Koperasi atas Aset Tetap dan Perlakuan Akuntansi Dalam Penyusunan Neraca yang diterapkan tetap dipertahankan agar laporan keuangan perusahaan tetap disajikan secara akurat.
2. Sebaiknya di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan metode penyusutan aset tetap.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini terbatas adanya yaitu membahas mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Di Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan, maka pemerintah mengeluarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi sumber data untuk penelitian berikutnya

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. Inggriani Elim, Ak.,ME.,CA dan Ibu Natalia Y. T. Gerungai, SE., Ak.,MM.,CA atas bimbingan dan arahnya selama penulis melakukan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Mulyani, Alfian, 2020. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaL Pada Entitas Akuntansi (Konsep dan Aplikasi). Kencana A, Jakarta, 2020.

Bahri, 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS.

Effendi, 2021. Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah. Penerbit CV BATAM PUBLISHER. ISBN : 9786239583040.

Fauziah, 2018. Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Penerbit Ilmu. ISBN : 978-602-6724-04-5.

Hasanah dan Fauzi, 2017. Akuntansi Pemerintahan. In Media, Bogor, 2017.

Msnila, 2021. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit MITRA CENDEKIA MEDIA. ISBN : 978-623-6957-40-0.

Sujarweni, 2019. Pengantar Akuntansi 2. PT. PUSTAKA BARU ISBN : 978-602-376-296-5.